

**PARADIGMA ETIKA POLITIK NABI MUHAMMAD SEBAGAI  
ACUAN TERHADAP POLITIK KONTEMPORER  
DI INDONESIA**

**ARTIKEL SKRIPSI**



**Oleh :**

**ABDUL SALAM AHMAD**

**NIM. 11144300028**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**2015**

**PARADIGMA ETIKA POLITIK NABI MUHAMMAD SEBAGAI  
ACUAN TERHADAP POLITIK KONTEMPORER  
DI INDONESIA**

**ABDUL SALAM AHMAD  
1114430028  
[hunalapa.abdu@gmail.com](mailto:hunalapa.abdu@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Nabi Muhammad, pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dan dinamika Politik kontemporer di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang meliputi metode pengumpulan data secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Etika politik Nabi Muhammad SAW. lebih mengedepankan *human relation* (hubungan kemanusiaan). Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW. dalam menjalankan misinya tidak hanya tertuju pada suatu kaum atau golongan, atau keturunan yang berbeda karena adat dan agamanya, warna kulit dan bangsawannya akan tetapi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yaitu *kafatan linnas* dan *rahmatan lil 'alamin*. Etika politik Nabi Muhammad SAW. belum digunakan sebagai acuan sepenuhnya dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Untuk itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan, baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia dimana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Kata Kunci: Etika, Politik Kontemporer.

**PARADIGM OF POLITICAL ETHICS PROPHET MUHAMMAD AS A  
REFERENCE TO CONTEMPORARY POLITICS  
IN INDONESIA**

**ABDUL SALAM AHAMD**  
**1114430028**  
**[hunalapa.abdu@gmail.com](mailto:hunalapa.abdu@gmail.com)**

**ABSTRACT**

This research aims to determine the prophetic political ethics, leadership patterns of prophet Muhammad SAW. and the dynamics of contemporary politics in Indonesia.

In preparing this paper the author uses literature study method that includes a systemic method of data collection from sources containing information relating to the matter to be investigated.

The final conclusion is that political ethics prophet Muhammad SAW. emphasizes human relations (human relations). It means that the prophet Muhammad SAW. in carrying out its mission not only focused on a people or group, or different breeds because customs and religion, skin color and his nobles but in accordance with the instructions of the Qur'an is *kafatan linnas* and *rahmatan lil 'alamin*. Political ethic prophet Muhammad SAW. not yet fully understood in contemporary political dynamics in Indonesia. To that and political must be based on high morality so as to give a new freshness to the political nuances. Politics without morality is one of the mistakes that can be devastating, both personally and community groups. While politics without principle is a building that is not based on moral strong and sturdiness. Politics is not just seize power and defend it. Moreover, politics is a world where commitment is plugged in and rounded in the fight for common interest.

Keywords : Ethics, Politics Contemporary.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi krisis multidimensi, politik, hukum, sosial budaya, bahkan moral masyarakat. Sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan. Tampaknya masalah besar tersebut belum dapat diatasi oleh para penyelenggara Negara; termasuk elit politik, baik disuprastruktur maupun infrastruktur yang akibatnya mengganggu stabilitas sosial budaya yang sedang dikembangkan dalam pembangunan nasional. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) semakin berkembang, kepastian hukum semakin tidak jelas, pengangguran, kemiskinan belum diatasi secara optimal. Akibatnya, rakyat bingung dan mempertanyakan tentang kemampuan elit politik dalam menyelesaikan problem bangsa.

Di dalam kancah perpolitikan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, semakin merajalela praktik-praktik yang kurang bermoral. Ditengah-tengah kehidupan elit politik terjadi pertarungan kepentingan antarpribadi dan kelompok yang sangat kuat sehingga tidak lagi mengindahkan siapa kawan dan siapa lawan termasuk saudaranya sendiri. Keadaan ini diperparah oleh kasus-kasus yang belakangan ini membawa para politikus elit kejeruji-jeruji penjara satu persatu. Itu semua menandakan kebejatan dan kehinaan moral suatu bangsa.

Alangkah malangnya bangsa ini karena perilaku elit politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keamanahan, dan keberwibawaan. Para elit politik kebanyakan tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok yang pada prinsipnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Bangsa ini mengalami krisis kejujuran, krisis kesadaran kolektif untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat destruktif yang merugikan kepentingan bersama. Banyak fenomena yang menunjukkan kemerosotan moral dan elit politik bangsa, mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Ditangan sebagian elit politik, jabatan yang di emban menjelma sebagai sarana untuk berlomba-lomba pada jalan kejelekan (*fastabiqul sayyiah*) dan bukan pada kebaikan (*fastabiqul khairat*). Para elit politik seolah lupa bahwa bangsa Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila yang

semua sila-silanya bersumber dari nilai-nilai agama. Akibatnya, para elit politik pun tidak terfikir lagi untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama dikalangan elit politik bisa dikatakan belum optimal. Hal ini tercermin belum optimalnya ajaran agama dijadikan sumber moral dan etika elit politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, agama baru dipahami dan diamalkan dalam ritual semata, sehingga belum menyentuh kesadaran dan kedalaman ajaran agama yang merupakan substansi yang paling *urgen* yang tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablum Minallah*) dan antar sesama manusia (*Hablum Minan Nas*) yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, moral dan etika elit politik seharusnya mencerminkan manusia yang percaya dan meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengawasi seluruh gerak-gerik kehidupannya di mana pun berada.

Karakter utama politik Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. bisa ditemukan di dalam piagam yang diberikan oleh Muhammad SAW. setelah kedatangannya di Madinah, serta dalam surat-suratnya yang dikirim pada orang-orang kristen, dan negara tetangga lainnya setelah Islam berdiri mantap di Jajirah Arab. Piagam tersebut telah memberikan sebagian besar dasar-dasar tuntunan pada semua penguasa muslim dalam memperlakukan rakyatnya. Bersikaplah lemah lembut pada semua orang dan jangan bersikap kasar. Hiburlah mereka dan jangan menghina.

Untuk itu, yang menjadi kunci bagi dunia elit politik saat ini adalah keteladanan dalam berpolitik. Ketika politik masih dianggap kotor oleh anggota masyarakat, maka melalui keteladanan berpolitik stigma politik yang negative itu dapat dihilangkan bukan dengan slogan tetapi melalui tindakan dalam berpolitik. Yaitu tindakan yang bermoral dan lebih mementingkan kemaslahatan bangsa dan Negara secara jujur dan istiqamah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang ada tersebut sebagai berikut diantaranya adalah, Masih terdapat praktik-praktik politik yang kurang bermoral baik ditingkat nasional maupun daerah, Perilaku elit politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-

nilai kejujuran, keamanan, dan keberwibawaan. Para elit politik belum meneladani praktik-praktik politik Nabi Muhammad dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama dikalangan elit politik bisa dikatakan belum optimal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui etika politik Nabi Muhammad SAW dan untuk mengetahui dinamika politik kontemporer di Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang meliputi metode pengumpulan data secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Etika Politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam islam, karena dipandang sebagai bagian dari ibadah, maka politik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Pada titik inilah, diskursus politik Islam, atau yang disebut sebagai *fiqh siyasah* akan selalu menarik untuk diangkat kepermukaan sekaligus diperbincangkan. Hal ini memerlukan kesadaran atas sejarah politik Islam yang termasuk di dalamnya adalah *venture* atau usaha yang tidak pernah berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

Perbincangan politik Islam adalah sebuah keniscayaan sejarah, yang senantiasa mengalir dari hulu ke hilir. Ibarat air pegunungan, politik Islam merupakan pembahasan yang luas, untuk itu tidak pernah ada kata *absolute* dan final dalam kajian tersebut. Yang menjadi kelemahannya adalah tidak tersediannya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan wajah lain tentang politik Islam. Sebab wajah politik Islam sebagaimana dianut oleh sebagian besar pemerhati dan aktivis politik Islam bahwa politik hanya disempitkan pada kekuasaan semata.

Nabi Muhammad adalah tokoh besar yang pernah disinari cahaya sejarah. Kisah hidupnya dicatat dengan seksama hingga rinci yang sekecil-kecilnya, dan diwariskan pada generasi berikutnya untuk selalu menjaga pertumbuhan umat manusia secara terus menerus. Kita mengetahui, laki-laki luar biasa ini, yatim piatu sejak kecil dan tak pernah mengenal kasih sayang ayahnya, tak pernah mengenal perhatian seorang ibu karena meninggal. Kehidupan awalnya penuh dengan penderitaan. Sejak kecil ia tumbuh menjadi seorang yang suka memikirkan segala sesuatu dengan mendalam. Ketika ia tumbuh menjadi pemuda, kecendrungan itu semakin bertambah. Kehidupan masa muda Muhammad begitu lurus dan bersih.

Meski sering gagal, Muhammad tak pernah ragu-ragu, meski terpukul ia tak pernah putus asa. Ia tetap gigih untuk melaksanakan misi yang ditugaskan padanya. Akhlak yang mulia dan suci dan kepercayaan yang mendalam terhadap rahmat Tuhan telah menarik banyak pengikut yang patuh dan setia. Sejak kemunculan Muhammad, sejarah kehidupannya bertaut dengan sejarah persemakmuran bangsa Arab tempat ia menjadi figure sentralnya. Sejak itu, ia telah menunjukkan siapa dirinya. Kemuliaan akhlak, solidaritas persahabatan yang kuat, keberanian, daya tahan kesungguhan dan semangat yang menyala-nyala untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran telah menunjukkan kepahlawanan Muhammad. Ia, seorang pemimpin yang membuat orang tak mungkin tidak mematuhi dan tak mungkin tak mencintainya. Sejak itu, hanyalah soal waktu, ketika orang Madinah mulai mengenal Muhammad, mereka juga akan mengetahui Muhammad jiwa raga dan antusiasme itu akan membakar dan menyebar ke segenap suku-suku lainnya hingga negeri Arab tunduk pada Muhammad sebagai utusan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada maharaja dengan mahkotanya yang begitu dipatuhi sebagaimana lelaki yang mempunyai kemuliaan untuk memengaruhi orang untuk selalu melakukan kebaikan.

Mencari padanan kata “masyarakat madani” dalam literatur bahasa kita memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam, tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai

madaniyah dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa. Namun banyak orang menyepadankan istilah ini dengan *civil society*, *societas civilis* (Romawi) atau *koinonia politike* (Yunani). Padahal istilah masyarakat madani dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya berbeda. Masyarakat madani merujuk tradisi Arab-Islam, sedang *civil society* pada tradisi Barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna berbeda apabila dikaitkan dengan konteks asal istilah itu muncul.

Masyarakat madani merupakan keterputusan konsep ummah yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan atas keberhasilan Nabi mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas. Meskipun secara ideal eksistensi masyarakat Madinah ini hanya sebentar tetapi secara historis memberikan makna yang sangat penting sebagai rujukan masyarakat di kemudian hari untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang sama. Dari pengalaman sejarah Islam masa lalu ini, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad secara kualitatif dipandang oleh sebagian kalangan intelektual muslim sejajar dengan konsep *civil society*. Dasar tatanan masyarakat madani memperoleh legitimasi kuat padalandakan tekstual (*nas*) Al-Qur'an maupun Haditsh dan praktik generasi awal Islam.

Masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang hanya mengenai supremasi kekuasaan pribadi seorang raja seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara. Meskipun secara eksplisit Islam tidak berbicara tentang konsep politik, namun wawasan tentang demokrasi yang menjadi elemen dasar kehidupan politik masyarakat madani bisa ditemukan didalamnya. Wawasan yang dimaksud tercermin dalam prinsip persamaan (*equality*), kebebasan, hak-hak asasi manusia, serta prinsip musyawarah. Prinsip persamaan bisa ditemukan dalam suatu ide bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, nasionalitas, atau status semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam Tuhan menegaskan; "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling

bertaqwa.”Nilai dasar ini dipandang memberikan landasan pemahaman, di mata Tuhan manusia memiliki derajat sama. Pemahaman inilah yang kemudian muncul dalam Hadith Nabi yang menegaskan bahwa tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang yang bukan Arab.

## **HASIL PENELITIAN**

Etika politik merupakan sebuah cabang dalam ilmu etika yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma digunakan untuk mengontrol perilaku politik. Etika politik menelusuri batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, asas-asas dalam ilmu hukum, peraturan-peraturan ketatanegaraan, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat tentang masyarakat dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi, dan kebijakan politik.

Etika politik tidak menerima begitu saja sebuah norma yang melegitimasi kebijakan-kebijakan yang melanggar konsep nilai inter subjektif (dan sekaligus nilai objektif juga) hasil kesepakatan awal. Jadi, tugas utama etika politik sebagai metode kritis adalah memeriksa legitimasi ideologi yang dipakai oleh kekuasaan dalam menjalankan wewenangnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa etika politik hanya dapat digunakan sebagai alat kritik. Etika politik harus pula dikritisi. Oleh karena itu, etika politik harus terbuka terhadap kritik dan ilmu-ilmu terapan.

Etika politik bukanlah sebuah norma. Etika politik juga bukan sebuah aliran filsafat atau ideologi, sehingga tidak dapat dijadikan sebuah pedoman siap pakai dalam pengambilan kebijakan atau tindakan politis. Etika politik tidak dapat mengontrol seorang politikus dalam bertindak atau mengambil keputusan, baik keputusan individu, organisasi, atau kelompok. Namun, etika politik dapat dijadikan rambu-rambu yang membantu politikus dalam mengambil keputusan.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara

bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Kemajuan sebuah negara dipengaruhi oleh faktor kemajuan pola pikir sumber daya manusianya. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah negara mempunyai perilaku kolektif yang baik maka perilaku kolektif inilah yang akan mencerminkan kualitas karakter sebuah bangsa. Karakter bangsa adalah ciri khas dan sikap suatu bangsa yang tercermin pada tingkah laku pribadi warga negara. Karakter bangsa juga sangat tergantung pada *pilitical will* pemerintah atau para penguasa sebuah negara karena karakter bangsa dapat dibangun sesuai dengan visi negara tersebut. Para *founding father* telah merumuskan Pancasila sebagai pondasi dan dasar negara Indonesia yang menjadi karakter bangsa dan harus ditransformasikan dalam setiap perilaku warga negara.

Realitasnya di Indonesia telah terjadi krisis karakter bangsa yang dilakukan oleh para elit politik. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya budaya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Maraknya kasus korupsi di Indonesia belakangan ini menimbulkan pertanyaan tentang karakter bangsa Indonesia. Persoalan

karakter kebangsaan kini menjadi hal yang banyak diperbincangkan dalam diskusi-diskusi publik.

Hal di atas dipicu dari maraknya persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, tindakan kriminal, kejahatan seksual, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif dan kehidupan politik yang tidak prouktif. Kasus-kasus degradai nilai-nilai moral tersebut merupakan bagian dari krisis karakter kebangsaan. Krisis kebangsaan ini dapat terjadi karena krisis keteladanan dengan kata lain bahwa tidak adanya sosok pemimpin atau elit politik yang menunjukkan perilaku negarawan yang menjadi figur bagi masyarakat untuk di contoh.

Sikap dan Tingkahlaku politik seseorang bisa dikatakan atau ditentukan oleh apa yang terkandung di dalam dirinya sendiri seperti, idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan dan juga kehendak hatinya. Di samping itu juga dipengaruhi oleh suasana lingkungan, kebudayaan, kehidupan beragama, politik, sosial dan juga ekonomi. Bilamana seseorang berhasil memposisikan dirinya sesuai dengan lingkungan di mana ia berada, maka sikap dan tingkahlaku politiknya akan cenderung memainkan peran positif dalam memelihara lingkungan yang ada itu, termasuk sistem politiknya. Persoalannya akan menjadi lain bila mana terdapat kesenjangan yang berarti antara apa yang terkandung di dalam dirinya dengan lingkungan yang melingkarinya. Dari sinilah akan melahirkan sikap dan tingkahlaku politik yang tampak aneh, janggal atau asing yang kadang-kadang juga dianggap negatif.

Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia dimana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum. Ada semacam landasan moral yang membuat para elit politik berani memperjuangkan hak-hak rakyat demi tercapainya sebuah cita-cita bersama. Bagaimana pun juga, politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan, baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh.

Oleh karena itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik.

Setiap saat masyarakat Indonesia selalu disuguhi dengan pandangan politik yang sangat memalukan seperti kasus korupsi. Perjuangan elit politik ibarat busur panah yang dilepaskan tidak tepat pada sasarannya, sehingga dapat membahayakan semua kalangan terutama kepentingan rakyat. Kehampaan moral akan membuat bangsa ini hancur dalam berbagai sektor kehidupan karena bangsa Indonesia akan berjalan tanpa arah yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sangat merindukan sosok pemimpin yang mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsanya. Pengharapan-pengharapan seperti ini merupakan potret dari sebuah bangsa yang lama dirundung kesedihan semacam situasi yang mencekam. Hal ini dikarenakan dinamika politik yang berjalan monoton dan melelahkan. Kenyataan itulah yang membuat banyak kalangan yang diselimuti perasaan pesimis terkait dengan arah masa depan bangsa.

Masyarakat seolah tidak bersabar lagi setelah rezim demi rezim tak mampu mewujudkan adanya perubahan yang besar sehingga dapat mengubah rasa pesimis atas harapan dan cita-cita yang tak kunjung membuahkan perubahan. Mungkin dengan jalan berdo'a dan sabar, bangsa ini akan tetap berdiri menerima sebuah fakta yang mengharukan. Sehingga dengan demikian, bangsa ini tidak pantas trauma politik akibat situasi politik yang sedang bergejolak dan berharap bangsa ini harus bangun dan menata kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya dan masyarakat juga sangat berharap agar para elit politik terus berjuang dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dengan berlandaskan pada moral yang baik.

Ungkapan Jawa yang kini menjadi salah satu adagium pandangan politik yaitu *ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi teladan) tidak hanya benar sebagai petunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin, tetapi justru lebih benar lagi karena ia menggambarkan kenyataan sosial apa yang menjadi akibat dari peranan kepemimpinan. Yakni, ungkapan itu menunjukkan bahwa para pemimpin mau tidak mau, akan berperan sebagai teladan untuk yang dipimpin, baik maupun buruk. Rakyat dan bawahan memahami apa yang ada dikepala para pemimpin lebih banyak dari tingkah laku nyata mereka, bukan dari ucapan-ucapan

mereka. Seperti dikatakan dalam ungkapan Arab, *lisan-u'l-bal afshab-u min lisan-i'l-maqal*, (bahasa perbuatan adalah lebih fasih atau tajam dari pada bahasa ucapan).

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Etika politik Nabi Muhammad SAW. lebih mengedepankan *human relation* (hubungan kemanusiaan). Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW. dalam menjalankan misinya tidak hanya tertuju pada suatu kaum atau golongan, atau keturunan yang berbeda karena adat dan agamanya, warna kulit dan bangsawannya akan tetapi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yaitu *kafatan linnas* dan *rahmatan lil 'alamin*. Etika politik Nabi Muhammad SAW. belum digunakan sebagai acuan sepenuhnya dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Untuk itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan, baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia dimana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran untuk para elit politik sebagai acuan untuk berpolitik sesuai dengan etika politik yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

1. Politik jangan dijadikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan mempertahankannya.
2. Politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik.
3. Agama harus dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan politik sebuah Negara. Dalam hal ini, Nilai-nilai agama sebagai sumber daya yang

penting di Indonesia, sudah sewajarnya dijadikan sebagai penentu dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam satu aktifitas dan sistem politik.

4. Elit politik harus memberi suri teladan terhadap rakyat sebagai simbol perwujudan moral dan etika yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau dalam konteks kenegaraan moral dan etika dijelaskan dalam sila-sila Pancasila.

Hal inilah yang harus dijadikan sebagai landasan para elit politik maupun pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, akan terwujudnya kondisi adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpinnya sehingga akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syed Ameer. 2008. *The Spirit Of Islam*. Yogyakarta: Navila.
- Amstrong, Karen. 1996. *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Efendy, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Demokrasi Project.
- Haryatmoko. Dr. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hidayat, Komaruddin. 2005. *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Kaelan. 2010. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Gramedia
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfudh, Sahal. 2003. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Nurcholish Madjid. 1987. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_. 2010. *Masyarakat Relegius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan*. Jakarta: Paramadina. Cetakan Ke-IV.

\_\_\_\_\_. 2010. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta Paramadina. Cetakan Ke-IV.

\_\_\_\_\_. 1999. *Cita-Cita Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.

\_\_\_\_\_. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.